

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun ini, fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah meningkatnya keinginan adanya akuntabilitas dan transparansi kinerja akan pengelolaan lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Pada dasarnya, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik pemerintah pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Istilah *good governance* dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Selama beberapa tahun yang lampau, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintahan yang bersih.

Terselenggara-nya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa bernegara. Untuk mewujudkan *good governance* tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas, dan

akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan, serta harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya, kemudian pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen LAKIP.

LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan pendorong terwujudnya *good governance*. LAKIP disusun dan disampaikan secara tertulis, periodik, dan melembaga. Pada dasarnya, LAKIP memuat informasi kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang ada sehingga keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi. Tahap akhir dari sistem akuntabilitas kinerja adalah dimanfaatkannya informasi kinerja bagi perbaikan kinerja ber-kesinambungan.

Penyusunan LAKIP adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dirancang pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perlu diketahui untuk melihat apakah kinerja pada instansi pemerintah telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, untuk itu dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat judul **“Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan tentang pelaporan kinerja pada latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja hambatan/ kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

1.3 Tujuan Magang

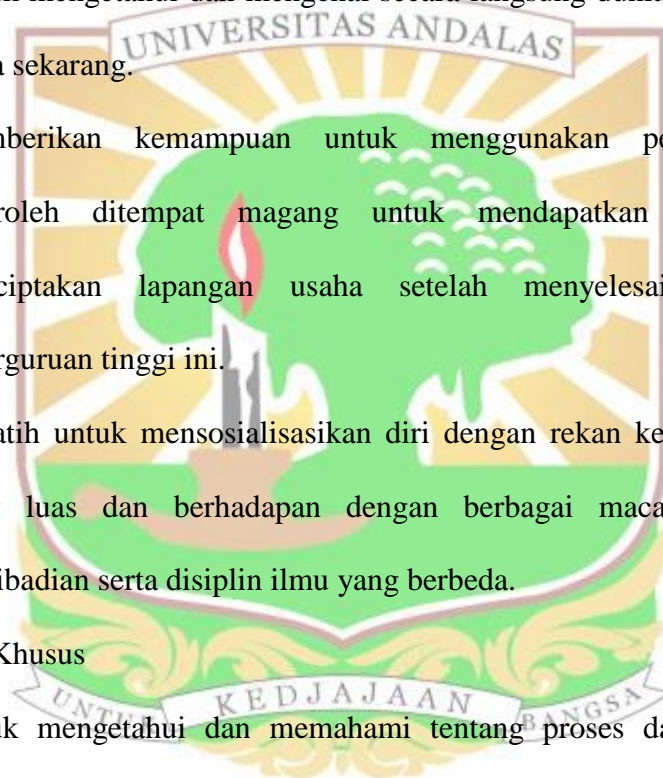
Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa/ mahasiswi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Adapun tujuan yang dicapai dalam kuliah kerja praktek/ magang ini adalah:

1. Tujuan Umum

- a. Melengkapai SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang didapatkan dari ilmu perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Universitas Andalas.
- c. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja nyata pada masa sekarang.
- d. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh ditempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan diperguruan tinggi ini.
- e. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam bentuk yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang proses dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui tentang hambatan/ kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.



1.4 Manfaat Magang

Magang merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pada instansi pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat. Adanya manfaat yang diperoleh secara garis besar bagi penulis sebagai berikut:

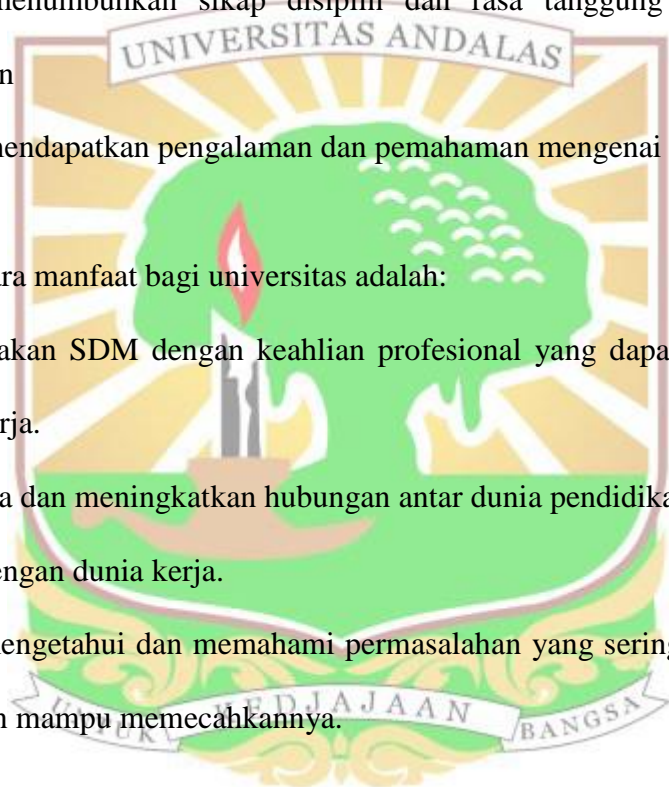
1. Untuk mempersiapkan diri sebagai Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan datang.
2. Dapat menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan
3. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja

Sementara manfaat bagi universitas adalah:

1. Menciptakan SDM dengan keahlian profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
2. Membina dan meningkatkan hubungan antar dunia pendidikan atau perguruan tinggi dengan dunia kerja.
3. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan yang sering terjadi di dunia kerja dan mampu memecahkannya.

Manfaat bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Secara langsung mendukung serta memberikan fasilitas bagi program pemerintah untuk menciptakan SDM berkualitas baik.
2. Membina hubungan baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.



1.5 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Kegiatan magang ini dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang beralamatkan di Jalan Raden Saleh Nomor 12, Flamboyan Baru, Padang Barat. Pelaksanaan magang berlangsung selama 40 hari kerja, dimulai pada tanggal 3 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 27 Februari 2017. Jam kerja pada hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB. Sedangkan pada hari Jum'at adalah pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB.

Selama mengikuti kegiatan magang ini penulis ditempatkan pada Sub Bagian Keuangan dan Program dimana bagian tersebut sesuai dengan judul laporan magang penulis yaitu Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat di uji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari :

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis guna melengkapi *Field Research*.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Analisa Deskriptif berupa pandangan, tinjauan, uraian dan paparan dari penulis yang berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data-data dan fakta yang diperoleh serta membandingkannya dengan teori yang diperoleh pada saat perkuliahan.

1.7 Sistematika Tugas Akhir

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat, waktu dan kegiatan magang serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini terdiri dari penjelasan teoritis tentang pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pengertian dan manfaat pengukuran kinerja, pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dasar hukum pemberlakuan LAKIP, penanggungjawab

penyusunan LAKIP, prinsip-prinsip LAKIP, manfaat dan tujuan LAKIP, fungsi LAKIP, waktu penyampaian LAKIP, dan mekanisme LAKIP.

BAB III Gambaran Umum

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari sejarah umum, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, struktur organisasi dari instansi pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan laporan yang dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.

